

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menghadapi masalah serius terkait dengan kemiskinan ekstrem. Pengurangan kemiskinan ekstrem ini merupakan agenda prioritas pemerintah, karena hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang pertama yaitu tanpa kemiskinan (no poverty) (Bappenas, 2020). Berdasarkan Kepmenko PMK No 32 Tahun 2022 disebutkan bahwa masyarakat yang tergolong miskin ekstrem jika kebutuhan hariannya tidak lebih dari Rp. 10.739/orang/hari atau Rp322.170 per-orang per-bulan. Angka ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Indonesia, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, air bersih, dan kesehatan.

Pada tanggal 4 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia mengarahkan dalam rapat terbatas agar kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai nol persen pada tahun 2024 (TN2K, 2022). Sebagai langkah konkret untuk mencapai target tersebut, dikeluarkanlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin. Inpres ini menekankan pada keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan implementasi yang lebih terarah dan efisien dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem, dengan mengintegrasikan kebijakan, sumber daya, dan langkah strategis dari berbagai pihak terkait. (Lestari & Robiani, 2023).

Dalam Inpres No 4 Tahun 2022 Pasal 1 tersebut berbunyi "Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem" (Presiden Republik Indonesia, 2022). Keterpaduan dan sinergi program ini

sangat penting karena kemiskinan ekstrem merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah saja. Diperlukan kolaborasi yang erat dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya kolaborasi tersebut, pemerintah optimis bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai pada tahun 2024, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Inpres ini.

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat 29 Huruf (c) menyatakan "Menyusun rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta menetapkan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pembaruan data penerima yang mencakup nama dan alamat (by name by address)" Langkah ini dirancang untuk memastikan ketepatan dalam penyaluran bantuan dan sasaran program penanggulangan kemiskinan, sehingga semua program menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Melalui diskusi yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah, disertai alokasi anggaran yang tepat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem akan lebih efektif, mengingat dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di masing-masing negara. Dapat efektif dan efisien. Indonesia (Fathurohman *et al.*, 2022).

Pada tahun 2023, Pemprov Jatim mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat atas kinerja luar biasa dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di provinsi tersebut (Dinas Informasi Jawa Timur, 2023). Keberhasilan ini tercermin dari penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem selama tahun 2020-2023.

Tabel 1 Data Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Timur

Tahun	Persentase (%)	Jumlah Orang
2020	3,90%	1.812.210 Orang
2021	2,14%	895.71 Orang
2022	1,59%	627.820 Orang
2023	0,82%	390.570 Orang

Sumber: Dinsos Jatim

Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur membawa dampak positif bagi pemerintah provinsi, karena mereka dapat lebih optimis dalam mencapai target sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yaitu mencapai 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Namun, perlu dicatat bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem ini tidak terjadi merata di seluruh Jawa Timur, melainkan hanya di 9 kabupaten/kota, yaitu Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Blitar, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Ponorogo (Azmi, 2023).

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten. Masih banyak target yang harus dikerjakan oleh provinsi Jawa Timur agar kemiskinan ekstrem di setiap daerah bisa mencapai 0%. Keberhasilan 9 kota/kabupaten tersebut harus dijadikan contoh oleh kabupaten/kota yang masih belum menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Strategi dan program yang berhasil diimplementasikan di daerah-daerah ini dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi lokal oleh daerah lain, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh dapat tercapai tepat waktu.

Dinsos Jatim memiliki tanggungjawab untuk implementasi berbagai program sosial dan kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Tanggung jawab ini sangat penting karena Dinas Sosial bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan berbagai inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sabarisman, 2019), termasuk penyaluran bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan bantuan modal usaha berupa uang cash sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap penerima manfaat, yang dananya berasal dari APBD Provinsi.

Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem ini merupakan upaya penanggulangan yang sangat serius terutama dalam implementasinya. Tantangan tersebut muncul karena keberhasilan program ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak, serta pemantauan langsung di lapangan. Berdasarkan permasalahan diatas yang dimana masih banyaknya kabupaten/kota yang belum mencapai target kemiskinan ekstremnya 0%.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis memiliki ketertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur: Studi pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur?
- 2) Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Memahami Bagaimana Implementasi Kebijakan Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur.
- 2) Untuk Memahami Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan membantu dalam wawasan dan referensi mahasiswa bagi mereka yang mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan dan terkait dengan peran Dinas Sosial. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa di masa depan dapat menyelesaikan kuliahnya dimasadepan dan juga dapat berguna bagi pengembangan karir professional mereka.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk referensi pertimbangan untuk menilai efektivitas program-program yang telah dijalankan, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, kebijakan dan program yang ada dapat disempurnakan dan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang telah disepakati.

E. Definisi Konseptual

1. Implementasi Kebijakan

Secara garis besar, implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan sesuatu. Hal ini umumnya memiliki hubungan dengan berbagai aktivitas yang bertujuan dapat mencapai target tertentu. Menurut Wibawa (dalam Wantania *et al.*, 2022), kebijakan implementasi Merujuk pada proses pelaksanaan keputusan yang mendasar terkait peraturan, yang biasanya tercantum dalam undang-undang, namun juga dapat berupa perintah dari pejabat penting atau peraturan lainnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan secara langsung berkaitan dengan banyak faktor seperti kehati-hatian para pembuat kebijakan, komitmen, niat baik pengguna kebijakan, dan sikap terhadap tujuan hukum. Bergantung pada konteksnya, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan mobilisasi sumber daya, baik alam, manusia, maupun keuangan, dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk menindaklanjutinya. Menurut teori George C. Edwards III, implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang berperan yaitu: Faktor komunikasi, Faktor sumber daya, faktordisposisi dan faktor struktur birokrasi. (Aziz, 2019).

- a) Komunikasi, merupakan suatu proses di mana instansi ataupun pembuat kebijakan untuk menyampaikan sebuah informasi baik itu kepada pemerintah ataupun sesama instansi yang berupa kebijakan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan kebijakan yang berhasil mengharuskan pelaksana mengetahui cara memahami dan menerapkan tujuan dan sasaran kebijakan. Kebijakan harus disampaikan kepada pelaksana program untuk menghindari miskomunikasi dalam implementasinya.
- b) Sumber Daya, merupakan unsur yang sangat penting didalam sebuah Implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan telah di komunikasikan dengan baik hal ini akan sia-sia jika Sumber Daya tidak mendukung. Oleh sebab itu dalam sebuah implementasi kebijakan memerlukan sebuah Sumber Daya yang relevan dan ahli akan imlementasi berjalan dengan efektif.

- c) Disposisi, dapat diartikan sebagai sikap, keinginan dan sifat-sifat yang ada dalam diri pelaksana kebijakan, seperti keteguhan hati, keseriusan dan kemandirian, yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksana memiliki perilaku yang baik, ia akan dapat menerapkan program sesuai dengan yang ada dalam isi kebijakan. Akan tetapi program tidak akan mencapai target jika para pelaksana memiliki sikap yang kurang baik.
- d) Struktur Birokrasi, yang bertugas menjalankan program, memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penerapan kebijakan. Komponen utama dalam model keterlibatan yang mencakup *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Birokrasi yang prosesnya terlalu lama akan menghasilkan pelaksanaan program yang rumit dan berbelit.

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang ataupun kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan kesejahteraan lainnya. Kemiskinan ini akan menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan mereka, karena mereka seringkali tidak dapat kehidupan yang layak dan juga tidak dapat Sumber Daya yang mereka butuhkan untuk mencapai kesejahteraan kehidupan mereka (Grestyana, 2023). Kemiskinan juga dapat menciptakan dampak yang negative bagi individu maupun sosial. Orang miskin seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi hidupnya dan layanan kesehatan dirinya sehingga mereka rentan sekali terserang berbagai penyakit. Kemiskinan sendiri memiliki beberapa jenis diantaranya;

- a) Kemiskinan Absolut merupakan suatu jenis kebutuhan dimana seseorang memiliki tingkat gaji di bawah garis kebutuhan atau banyak gaji yang tidak begitu baik dalam mencukupi kehidupan dasar seperti makan, rumah, dan perlindungan kesehatan.
- b) Kemiskinan relatif merupakan keadaan orang yang disebabkan karena kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga tidak dapat mengakses semua orang. Sehingga biasanya disebagian daerah ketimpangan

sosialnya cukup tinggi. Kemiskinan relative juga bisa disebut sebagai perbandingan antara penduduk dan lingkungannya.

- c) Kemiskinan kultural merupakan kemiskina yang disebabkan karena faktor kebiasaan buruk mereka yang melekat menjadi budaya seperti halnya malas, suka foya-foya, pemboros, kurangnya etos kerja danlainnya. Faktor kebiasaan ini sangatlah sulit dihilangkan, karena hanya diri sendirilah yang dapat merubah hidup dan Nasib mereka.
- d) Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan berasal dari sosial yang sudah melekat pada golongan tertentu sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan Sumber Daya yang ada disekitaran mereka.

3. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk mengakses kehidupan dasar, seperti makanan yang layak, sanitasi, kebugaran, perumahan, pengetahuan, dan informasi (Taufiq, 2024). Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan sosial esensial. Menurut Fatikhurizqi & Kurniawan (2020), indikator kemiskinan ekstrem diukur dari pengeluaran harian sebesar Rp10.739 per individu atau Rp322.170 per bulan. Sebagai perbandingan, kategori miskin mencakup pengeluaran harian sebesar Rp17.851 atau Rp535.547 per bulan. Perbedaan signifikan ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

Dalam konteks rumah tangga, sebuah keluarga dengan empat anggota (ayah, ibu, dan dua anak) dianggap sangat miskin jika total pengeluarannya tidak melebihi Rp1.288.680 per bulan (Faujan & Agustina, 2024). Situasi ini semakin diperparah oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan, sehingga membatasi kemampuan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, strategi mata pencaharian yang tidak optimal sering kali menjadi penghambat utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem (Rahmawati & Sebayang, 2022). Misalnya, rendahnya keterampilan kerja dan minimnya peluang ekonomi memperburuk ketidakstabilan pendapatan, yang berdampak pada kelangsungan hidup kelompok ini.

Dampak kemiskinan ekstrem juga terlihat dalam ketidakmampuan individu untuk memperoleh makanan bergizi dan sehat, yang pada akhirnya menghambat perkembangan fisik dan intelektual. Ketidacukupan nutrisi ini tidak hanya memperburuk kesehatan masyarakat miskin tetapi juga menyebabkan inefisiensi dalam produktivitas kerja, sehingga membentuk siklus kemiskinan yang sulit diputus. Situasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengimplementasikan strategi yang lebih inklusif, seperti peningkatan akses terhadap layanan sosial, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta penguatan kebijakan perlindungan sosial yang berkelanjutan. Tanpa intervensi yang efektif, kemiskinan ekstrem akan terus menjadi tantangan struktural yang memperlambat pembangunan sosial dan ekonomi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan langkah mengubah konstruk abstrak menjadi definisi yang konkret dan terukur. Ini dilakukan dengan menetapkan variabel-variabel yang dapat diamati, diukur, atau dihitung secara spesifik. Definisi operasional memungkinkan konsep atau variabel abstrak untuk dioperasionalkan dalam pengumpulan data empiris. Definisi operasional memainkan peran penting dalam penelitian ilmiah dan pengukuran dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, psikologi, ekonomi, dan ilmu lainnya. Dalam konteks penelitian, definisi operasional memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengukur atau mengamati variabel-variabel yang terlibat

1. Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur
 - a. Kordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - 1) Sosialisasi Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - 2) Pemahaman Verifikasi Dan Validitas Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - 3) Keberlanjutan Pedoman Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - b. Sumber Daya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - 1) Sumber Daya Anggaran Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- 2) Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 3) Sumber Daya Prasarana Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- c. Tindak lanjut Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 - 1) Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - 2) Penghargaan Fiskal Penurunan Kemiskinan Ekstrem
- d. Sistem Organisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 - 1) Prosedur Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - 2) Pembagian Tanggung Jawab pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur.
 - a. Faktor Pendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 - b. Faktor Penghambat Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian deskriptif untuk menjelaskan secara nyata tentang keadaan yang ada atau jaringan antara berbagai kejadian aktual secara terstruktur (Rusli *et al.*, 2019). Penelitian ini memungkinkan peneliti mengamati dan mendokumentasikan berbagai aspek yang terjadi dalam lingkungan penelitian tanpa mempengaruhi kondisi yang ada, sehingga data yang diperoleh merupakan representasi akurat dari keadaan sebenarnya. Pendekatan kualitatif memberikan pemahaman mendalam dan mendetail tentang objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang kaya dan kompleks, serta memberikan gambaran jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan memahami makna dari fenomena yang diamati, peneliti dapat menginterpretasikan data secara kontekstual, dan menyajikan hasil penelitian secara komprehensif.

2. Sumber Data

Penelitian ini memakai dua kategori sumber data, yang masing-masing memberikan kontribusi penting untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai permasalahan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur.

a) Data Primer

Dalam penelitian ini diperlukanlah data yang langsung dari sumbernya yaitu data primer melalui tanya jawab atau wawancara dan observasi. Pengumpulan data primer sangat penting karena memberikan informasi yang lebih langsung dan kontekstual dari subjek penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian mencari data secara langsung dengan mewawancarai pegawai dinas sosial yang memiliki kemampuan dibidang pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat penerima manfaat (PM), yang menjadi objek dari kebijakan kemiskinan ekstrem tersebut. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali informasi secara langsung mengenai persepsi dan pengalaman para informan terkait dengan program yang ada. Observasi juga dilakukan untuk mengamati pelaksanaan program kemiskinan ekstrem di daerah ini, dengan fokus pada pengamatan langsung terhadap praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh instansi terkait.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperlukan untuk mendukung data primer yang dikumpulkan dari dokumen Renstra, Renja, dokumen arsip dan dokumen terkait dengan kemiskinan ekstrem yang sebelumnya sudah tersedia. Data ini berguna untuk melengkapi dan memperkuat temuan yang diperoleh dari data primer. Selain itu, dokumen terkait implementasi Instruksi Presiden mengenai penanggulangan kemiskinan ekstrem juga digunakan untuk memberi wawasan tambahan mengenai kebijakan yang diterapkan dan hasil yang diharapkan dari program tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan yang cukup krusial dalam pelaksanaan penelitian yaitu Teknik pengumpulan datanya karena dapat mempengaruhi kualitas penelitian tersebut.

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data diantaranya;

a) Observasi

Observasi dilakukan di lingkungan kantor dinsos jatim sebagai tempat utama penelitian. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaa kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, khususnya dalam konteks Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi tidak berstruktur, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa pedoman yang ketat, dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi dinamika sosial yang terjadi serta interaksi antara berbagai pihak yang ikut serta sebagai pelaksanaan program kemiskinan ekstrem.

b) Wawancara

Wawancara atau tanya jawab yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah waancara semi-terstruktur. Maka dari itu, proses ini lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dan mendalam sesuai dengan arah pembicaraan yang berkembang. Informan yang diwawancarai mencakup koordinator dan kelompok jabatan fungsional di Dinas Sosial, pengelola data, serta masyarakat penerima manfaat (PM). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat.

c) Dokumentasi

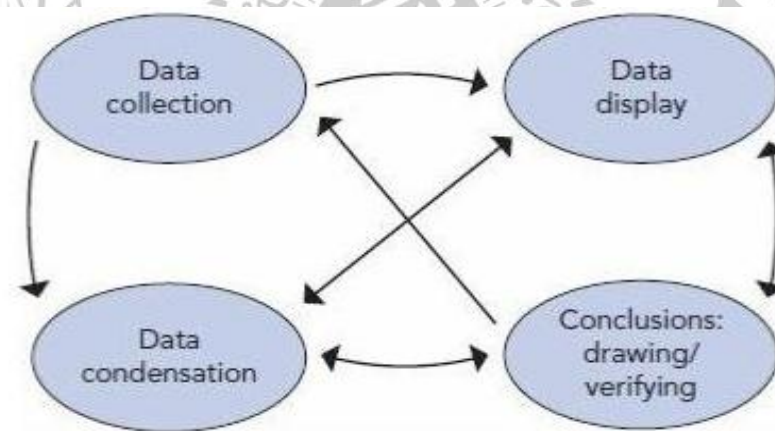
Pengumpulan data sekunder seperti dokumentasi ini merupakan proses yang cukup penting, karena dalam dokumentasi ini mencakup tentang pengumpulan laporan, merekam kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Merekam kegiatan ini sangatlah penting karena dapat dijadikan sebagai referensi untuk menganalisis kebijakan dan hasil implementasi.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini meliputi berbagai perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur. Penentuan subjek penelitian harus disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang relevan dan spesifik. Dalam penelitian ini subjek penelitian yaitu, Sub Koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional (Lilik Sugiarti, S.Sos., M.Si.), Pengelola Data (Anggitha Utami), Masyarakat Penerima Manfaat (PM) (Rudi Sugiharto).

5. Teknik Analisis Data

Proses analitis data adalah proses yang cukup krusial dalam pelaksanaan penelitian, karena akan menentukan bagaimana data yang telah terkumpul dapat diinterpretasikan dan disajikan untuk menghasilkan temuan yang jelas dan bermanfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis data kualitatif dengan teknik analisis interaktif, yang meliputi tiga langkah utama yaitu; (Wanto, 2019).



Gambar 1 Components Off Data Analysis: Interactive Model

a) Kondensasi Data.

Kondensasi data adalah langkah awal dalam proses analisis, peneliti melakukan pemilahan dan pemfokusan terhadap data yang relevan. Setelah melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi, peneliti akan meringkas informasi yang terkumpul dengan menyoroti poin-poin utama yang terkait dengan permasalahan kemiskinan ekstrem. Kondensasi data memungkinkan peneliti untuk mengurangi data yang

tidak relevan dan fokus pada aspek-aspek yang penting untuk menjabarkan lanjutannya.

b) Penyajian Data

Setelah melakukan kondensasi data lalu dilakukan penyusunan secara sistematis atau penyajian data agar dapat diinterpretasikan dengan mudah. Langkah ini dapat berbentuk deskripsi yang lebih ringkas ataupun berbentuk grafik yang relevan dengan focus penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi kemiskinan ekstrem di Jawa Timur serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Penyajian data yang baik memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang berlandaskan kondisi dilapangan.

c) Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Pada proses ini akan ditarik Kesimpulan dari hasil data yang telah dikumpulkan dan dilakukan analisis. Kesimpulan ini harus relevan dengan tujuan penelitian dan dapat menjawab pertanyaan yang telah ada pada rumuan masalah. Penarikan kesimpulan akan difokuskan pada sejauh mana kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang diterapkan di Jawa Timur berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup Masyarakat. Verifikasi Kesimpulan juga diperlukan untuk mengkonfirmasi dari hasil yang didapat valid dan bisa dipertanggungjawabkan

Tujuan secara keseluruhan dari penelitian ini untuk memberikan deskripsi yang mendalam terkait dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Dengan mengandalkan berbagai sumber data yang relevan dan Teknik analisis data yang tepat. Kontribusi penelitian ini bisa dijadikan untuk merancang kebijakan sosial yang bertambah efektif terutama mengatasi kemiskinan ekstrem di masa depan.